

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencatatan akuntansi dalam hal aset bersejarah khususnya mengenai Museum masih diperdebatkan karena aset bersejarah disebut sebagai aset yang cukup unik karena memiliki beragam cara untuk memperolehnya, tidak hanya melalui pembangunan atau kerajinan namun juga dengan cara pembelian, donasi, warisan, sitaan. Aset bersejarah yang terdapat di Museum biasanya dikelola pihak pemerintah yang bertujuan untuk melayani kebutuhan publik yang merupakan salah satu bukti materil hasil budaya untuk menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Di Sumatera Selatan khususnya Palembang adalah sebagai pusat kerajaan sriwijaya yang tentunya mempunyai koleksi benda-benda masa lampau yang mempunyai nilai sejarah dan budaya yang tinggi, khususnya adalah karya-karya seni rupa yang dalam hal ini adalah seni kerajinan tangan dan salah satu museum yang banyak menyimpan produk seni kerajinan palembang masa lampau adalah Museum Balaputra Dewa Negeri Sumatera Selatan yang terletak di pusat kota palembang.

Museum Balaputra Dewa Palembang merupakan salah satu benda peninggalan bersejarah dan termasuk ke dalam kategori aset bersejarah di Palembang. Disamping merupakan salah satu ikon dan tujuan wisata utama oleh para wisata, Museum juga merupakan benda cagar budaya nasional yang dengan

demikian patut untuk dilestarikan, dijaga dan diperhatikan pengelolaannya, khususnya dari segi pelaporan keuangan dan perlakuan akuntansi yang diterapkan atas aset bersejarah tersebut. Akan tetapi dalam melakukan pelaksanaan untuk pelaporan keuangan, Museum BalaPutra Dewa masih menghadapi kendala yaitu sulitnya menilai dan mengungkapkan Aset-aset bersejarah tersebut kedalam laporan keuangan.

Permasalahan lain yang muncul mengenai aset bersejarah yang dilihat dari pengakuan aset yaitu adanya perdebatan terhadap penggolongan aset, yaitu apakah aset bersejarah tersebut masuk ke dalam kategori aset atau termasuk kedalam kategori kewajiban. Barton (2000) mengemukakan bahwa pengelola aset biasanya tidak mempunyaipengendalian yang penuh terhadap asetnya, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan penghapusan aset, oleh sebab itu maka aset bersejarah harus dianggap sebagai “barang dalam kepercayaan”.

Mautz (1988) menyatakan bahwa layanan yang diberikan oleh benda –benda yang bersejarah secara bebas ditawarkan kepada masyarakat umum dengan biaya yang relatif rendah, namun untuk biayapemeliharaannya terkadang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh pihak pengelola.

Oleh sebab itu, maka Mautz (1988) menganggap bahwa benda bersejarah tersebut bukanlah aset, melainkan lebih baik bila dikategorikan sebagai kewajiban. Sependapat dengan Mautz, Carnegie dan Wolnizer (1999) menyatakan bahwa benda bersejarah harus dianggap sebagai kewajiban, hal ini dikarenakan benda – benda bersejarah tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan untuk dikategorikan sebagai aset baik dalam sisi akuntansi konvensional maupun dalam istilah komersial.

Namun Micallef dan Peirson (1997) berbeda pandangan, menurutnya benda-benda bersejarah tersebut termasuk ke dalam kategori aset oleh sebab itu maka aset tersebut harus diperlakukan sama dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk jenis aset tetap lainnya.

Selanjutnya permasalahan lain berhubungan dengan penilaian aset bersejarah yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Menurut *Financial Reporting Statements* (2009) penilaian atas aset bersejarah dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan. Namun, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 tidak memperkenankan dilakukannya penilaian kembali (*revaluation*) hal ini dikarenakan PSAK menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, dapat dilakukan revaluasi atas aset yang dimiliki agar nilai aset tetap yang ada pada saat ini dapat mencerminkan nilai wajar sekarang.

Selain daripada hal tersebut, PSAK menyatakan bahwa terdapat beberapa aset bersejarah yang memberikan manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, seperti bangunan bersejarah yang dimanfaatkan sebagai ruang perkantoran. Sehingga dalam hal ini, perlakuan asetnya akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Namun, secara teknis di dalam PSAK belum menjelaskan bagaimana cara untuk menilai aset tersebut.

Permasalahan berikutnya yaitu pada tahap akan melakukan pengungkapan aset. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting, dikarenakan sebagai pengelola dan pemelihara aset bersejarah, pemerintah harus mampu menyajikan

laporan keuangan dengan transparan dan akuntabilitas terhadap manfaat yang telah mereka peroleh dari aset bersejarah tersebut (Barton, 2000).

Pengungkapan terhadap aset bersejarah tidaklah diperlakukan sama untuk jenis aset yang sama. Dimana, pengungkapan atas aset bersejarah lebih didasarkan pada fungsi dan perannya di dalam kegiatan pemerintahan.

Agustini dan Putra (2011) berbeda pandangan dimana dijelaskan bahwa entitas pemerintah seharusnya memperlakukan sama antara *non operational heritage* dan *operational heritage*, yaitu diungkapkan ke dalam neraca dengan catatan aset tersebut memiliki kos yang dapat diukur secara andal.

Menurut pendapat Masitta dan Chariri (2015) meneliti perlakuan akuntansi pada museum Jawa Tengah Ronggowarsito, dari hasil penelitiannya ia menemukan bahwa sebagian besar informan cenderung memaknai aset bersejarah dengan istilah cagar budaya, disamping itu peraturan yang diterapkan oleh museum tersebut juga lebih didasarkan pada peraturan tentang pengelolaan cagar budaya.

Lebih lanjut, Safitri dan Indriani (2017) meneliti perlakuan akuntansi untuk museum Aceh, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun museum Aceh termasuk ke dalam kategori aset bersejarah, namun pada pelaporannya aset tidak diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Disamping itu, ia menjelaskan bahwa sebagian besar para kurator yang terlibat dalam penelitian tersebut cenderung lebih memahami aset yang mereka miliki sebagai barang/benda koleksi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Inventarisasi Perlengkapan dan Peralatan Museum Bala Putera Dewa Palembang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana inventarisasi perlengkapan dan peralatan Museum Bala Putera Dewa Palembang?
2. Apakah inventarisasi perlengkapan dan peralatan Museum Bala Putera Dewa Palembang telah sesuai dengan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis inventarisasi perlengkapan dan peralatan Museum Bala Putera Dewa Palembang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian inventarisasi perlengkapan dan peralatan Museum Bala Putera Dewa Palembang dengan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Guna membatasi penelitian ini agar tidak terlalu melebar, maka peneliti dalam penelitian ini hanya membahas mengenai analisis inventarisasi perlengkapan dan peralatan Museum Bala Putera Dewa Palembang

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini menambah wawasan peneliti mengenai inventarisasi perlengkapan dan peralatan menurut Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pengelola Museum Bala Putera Dewa Palembang dalam pengambilan kebijakan sehubungan dengan inventarisasi perlengkapan dan peralatan menurut Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap

1.6. Sistematika Penulisan

Manfaat dari sistematika penulisan ini adalah memberikan gambar yang sistematis serta agar pembaca dapat mengetahui masalah-masalah yang ada dalam skripsi ini, maka sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikantentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berupa teori – teori tentang perlakuan akuntansi inventarisasi perlengkapan dan peralatan. Di dalam bab ini juga

menjelaskan tentang tinjauan penelitian terdahulu, , dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang dasar penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari analisis data dan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA